

P-ISSN: 1858-2168
E-ISSN: 2621-251X

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

PUSLATBANG KMP LAN RI

VOLUME XVIII NOMOR 2 DESEMBER 2022

Penanggung Jawab:

Dr. Andi Taufik, M. Si

Redaktur/Journal Editor:

Anita, S. Sos., M. Si

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Abdul Mahsyar, M. Si
Prof. Dr. Haedar Akib, M. Si
Prof. Dr. Nurliah Nurdin., MA
Prof. Dr. Drs. Sam'un Jaja Raharja, M. Si
Dr. Firdaus Muhammad, M.Si
Dr. Asropi S. IP, M. Si
Dr. Hayat, S.A.P., M.Si
Dr. Bevaola Kusumasari, M. Si
Dr. Rulinawaty, S. Sos., M. Si
Dr. St. Syamsudduha, M. Pd
Dr. Puji Lestari, M. Si

Editor:

Dr. Frida Chairunisa, M. Si
Dr. Halim, SH., MH
Dr. Johan Tarru Mada, M. Si
Milawaty, SS, MM

Penyunting/Section Editor:

Zaenal Z., S. Sos., M. Adm. Pemb.
Satria Eka Tri Laksana, S.IP

Copy Editor & Layout Editor:

Avrina Dwijayanti, S. IP.
Ayun Sri Damayanti, SH., MH
Nur Khasanah Latief, S. IP
Carmelia, S.E
St. Aflaha, S.E.

Desain Grafis:

Muhammad Iqbal, S. Sos., MA

Volume XVIII Nomor 2 Desember 2022

JURNAL
**ADMINISTRASI
PUBLIK**
PUSLATBANG KMP LAN RI

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan
Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KMP LAN)
Jl. Raya Baruga No. 48 Makassar, 90234
E-mail: jap@lan.go.id | URL: <http://makassar.lan.go.id/jap>

CALL FOR PAPER:

Redaksi menerima naskah hasil penelitian, analisis, kajian, pemikiran kritis, dan gagasan ilmiah dalam lingkup bidang administrasi publik yang belum diterbitkan di jurnal ilmiah lainnya. Naskah hendaknya diketik dalam MS Word menggunakan Bahasa Indonesia sepanjang 6000-8000 kata, ukuran A4, huruf Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1,5. Abstrak ditulis dalam dwi bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) masing-masing sepanjang 100-200 kata. Naskah di-submit ke [http: <http://makassar.lan.go.id/jap>](http://makassar.lan.go.id/jap) atau dikirim melalui email ke Redaksi dalam bentuk soft file copy. Redaksi berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi akan di-review oleh Mitra Bestari (Reviewer).



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2022

**JURNAL
ADMINISTRASI
PUBLIK**

PUSLATBANG KMP LAN RI

Volume XVIII Nomor 2 Desember 2022
Hal. 155-300

-
- | | |
|---|---------|
| 1. BUDAYA KERJA BARU YANG PROBLEMATIS DI PEDESAAN SIGI | 155-171 |
| Sitti Rabiatal Wahdaniyah Herman, Yulian Sri Lestari, Sunardi | |
| 2. EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERDASARKAN MODEL EVALUASI KIRKPATRICK LEVEL 1 DAN LEVEL 2 | 172-191 |
| Yunni Susanty | |
| 3. IMPLEMENTASI <i>OPEN WORKSPACE</i> DALAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI | 192-210 |
| Sandy, Sitti Khadijah Herdayani Darsim, Jumalia Mannayong | |
| 4. ANALISIS DIGITALISASI PELAYANAN PEMBAYARAN Pensiun MELALUI APLIKASI TASPEN OTENTIKASI DI PT. TASPEN (PERSERO) KENDARI | 211-230 |
| Abdul Sabaruddin, Rahmat Hidayat, Ditha Putri Lestari | |
| 5. PENERAPAN REVIU PENGADAAN BARANG/JASA SECARA <i>ONLINE</i> LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN | 231-262 |
| Rusman Tangilomban, Muttaqin, Deasy Mauliana | |
| 6. PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PRAKTEK <i>ILLEGAL LOGGING</i> DI KELURAHAN BATTANG KECAMATAN WARA BARAT KOTA PALOPO | 263-282 |
| Andi Ni'mah Sulfiani, Riska Firdaus | |
| 7. STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI | 283-300 |
| Henri Prianto Sinurat, Ervina Yunita, Rati Sumanti | |

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

PUSLATBANG KMP LAN RI

P-ISSN: 1858-2168

E-ISSN: 2621-251X

Volume XVIII Nomor 2 Desember 2022

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2, Desember 2022 dapat kembali hadir ke hadapan pembaca.

Di edisi kali ini, Jurnal Administrasi Publik menghadirkan 7 artikel yang secara keseluruhan merupakan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik. Tulisan pertama ditulis oleh Sitti Rabiatul Wahdaniyah Herman, Yulian Sri Lestari, Sunardi dengan judul “Budaya Kerja Baru yang Problematis di Pedesaan Sigi”. Tulisan kedua berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunni Susanty yang bertajuk “Evaluasi Program Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick Level 1 dan Level 2”. Tulisan ketiga dihadirkan oleh Sandy, Sitti Khadijah Herdayani Darsim, Jumalia Mannayong dengan judul “Implementasi *Open Workspace* dalam Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai”. Tulisan keempat ditulis oleh Abdul Sabaruddin, Rahmat Hidayat, Ditha Putri Lestari yang diberi tajuk “Analisis Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun Melalui Aplikasi Taspen Otentikasi di PT. Taspen (Persero) Kendari”. Dalam tulisan kelima, Rusman Tangilomban, Muttaqin, Deasy Mauliana mencoba menuliskan hasil penelitiannya mengenai “Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara Online Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”. Tulisan keenam dihadirkan oleh Andi Ni'mah Sulfiani, Riska Firdaus yang mengambil judul “Pengawasan Pemerintah Dalam Praktek *Illegal Logging* di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo”. Adapun tulisan ketujuh, ditulis oleh Henri Prianto Sinurat, Ervina Yunita, Rati Sumanti dengan judul “Strategi Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai”.

Redaksi Jurnal Administrasi Publik mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis yang telah bersedia mengirimkan naskahnya kepada kami. Tidak lupa kami mengundang pembaca untuk berpartisipasi mengirimkan tulisan yang dimiliki untuk Jurnal Administrasi Publik edisi selanjutnya.

Semoga setiap tulisan yang ada di dalam jurnal edisi ini dapat menjadi motivasi, sumbangan ide, serta tambahan ilmu bagi seluruh pembaca. Salam inovasi.

Redaksi

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

PUSLATBANG KMP LAN RI

P-ISSN: 1858-2168

E-ISSN: 2621-251X

Volume XVIII Nomor 2 Desember 2022

Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/di-copy tanpa izin dan biaya

Sitti Rabiatal Wahdaniyah Herman, Yulian Sri Lestari, Sunardi

Budaya Kerja Baru yang Problematis di Pedesaan Sigi

Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2 Desember 2022, Hal. 155-171

Work From Home (WFH) menjadi fenomena baru yang melanda instansi birokrasi pemerintahan di Indonesia. Skema kerja ini seakan menjadi budaya kerja baru seiring dengan menguatnya kasus COVID-19 yang pernah melanda Indonesia. Birokrasi pemerintahan di pedesaan menjadi salah satu yang terkena imbas dari penerapan budaya kerja baru, *work from home*. Kondisi ini problematis, pasalnya disaat yang sama berhadapan dengan budaya layanan masyarakat pedesaan yang terbiasa dengan *face to face*. Studi ini akan memotret berbagai problem dari praktek *work from home* yang di implementasikan di dua desa pada kabupaten Sigi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara berlangsung kepada sekretaris desa Kalubula, Kasi Pembangunan Desa Ampanau, masing-masing dua staf di dua desa, tokoh masyarakat dan sejumlah masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujud dari *work from home* yang di realisasikan oleh kedua desa dengan cara berbeda di respon dengan tidak ramah oleh masyarakat pedesaan. Desa di Kalubula merespon perkembangan COVID-19 melalui penerapan kerja dengan pembagian *shift kerja*, sementara di desa Ampanau dilakukan melalui pembatasan jam kerja layanan. Alih-alih menciptakan layanan publik di pedesaan menjadi lebih efektif, ternyata dilapangan budaya kerja baru ini justru memunculkan persoalan baru.

Kata kunci: pedesaan; layanan publik; budaya kerja; Covid-19.

Yunni Susanty

Evaluasi Program Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick Level 1 dan Level 2

Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2 Desember 2022, Hal. 172-191

Pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai yang akan berkontribusi positif terhadap kinerja organisasi. Untuk itu, program pengembangan kompetensi harus dievaluasi untuk melihat efektivitas penyelenggaraannya. Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengevaluasi program pengembangan kompetensi menggunakan model evaluasi

Kirkpatrick level 1 untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta dan model evaluasi *Kirkpatrick* level 2 untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti program pengembangan kompetensi. Teknik pengolahan dan analisa data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peserta merasa puas terhadap aspek fasilitator dan aspek penyelenggara serta terdapat peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan program pengembangan kompetensi di masa yang akan datang.

Kata kunci: evaluasi; model evaluasi *Kirkpatrick*; pengembangan kompetensi.

Sandy, Sitti Khadijah Herdayani Darsim, Jumalia Mannayong

Implementasi *Open Workspace* dalam Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai

Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2 Desember 2022, Hal. 192-210

Konsep ruang kerja terbuka menjadi langkah inovatif bagi sebagian perusahaan besar dalam menciptakan suasana kerja nyaman dan fleksibel yang nantinya berdampak pada produktivitas kerja karyawan yang meningkat, seperti yang dilakukan perusahaan *google*. Konsep ruang kerja terbuka di kantor swasta begitu mudah diterapkan, namun bagaimana halnya di kantor pemerintahan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *open workspace* pada instansi pemerintahan dan seperti apa dampak pada kinerja pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dan observasi pada 2 (dua) kantor yang berada dalam lingkup Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng dan KPP Pratama Makassar Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *open workspace* pada instansi pemerintahan dalam hal ini KKP Pratama Bantaeng dan KKP Pratama Makassar Selatan sudah diterapkan, namun dilakukan secara bertahap. Perubahan ruang kerja pada lokus penelitian telah membawa dampak positif terhadap lingkungan kerja bagi pegawai seperti terciptanya suasana yang lebih komunikatif sehingga menciptakan ruang-ruang diskusi untuk menghasilkan ide-ide baru, pemecahan masalah lebih cepat teratasi, kerjasama dan sinergitas pegawai dalam menjalankan tugas makin erat. Olehnya itu menata lingkungan kerja merupakan hal yang sangat penting salah satunya dengan menggunakan konsep *open workspace*, karena hal ini berdampak pada kenyamanan dan kepuasan pegawai dalam berkerja yang berimplikasi pada peningkatan kinerja pegawai.

Kata kunci: ruang kerja terbuka; lingkungan kerja; kinerja pegawai.

Abdul Sabaruddin, Rahmat Hidayat, Ditha Putri Lestari

Analisis Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun Melalui Aplikasi Taspen Otentikasi di PT Taspen (Persero) Kendari

Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2 Desember 2022, Hal. 211-230

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana proses digitalisasi pelayanan pembayaran pensiun melalui aplikasi Taspen Otentikasi di PT Taspen (Persero) Kendari. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah PT Taspen (Persero) Kendari.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Taspen (Persero) Kendari dan penerima manfaat dana pensiun. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian tentang analisis digitalisasi pelayanan pembayaran pensiun melalui aplikasi Taspen Otentikasi di PT Taspen (Persero) Kendari sudah berjalan dengan baik karena telah menerapkan tiga elemen pengembangan digitalisasi di sektor publik. Pertama, *Support* (dukungan) dari pihak Taspen (Persero) Kendari berupa adanya dukungan dari kepala cabang hingga staff dan dialokasikannya sumber daya manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi dan infrastruktur teknologi. Kedua, *Capacity* (Kemampuan) dalam segi finansial, infrastruktur teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Ketiga, *Value* (manfaat) yang diberikan kepada pensiunan dengan adanya aplikasi Taspen Otentikasi berupa keterbiasaan dan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi dan merasa terbantunya para pensiunan dalam melakukan otentikasi setiap bulan dengan aplikasi Taspen Otentikasi karena lebih hemat dan terjangkau.

Kata kunci: digitalisasi; pelayanan; pensiun; aplikasi Taspen Otentikasi

Rusman Tangilomban, Muttaqin, Deasy Mauliana

Penerapan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Secara Online Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2 Desember 2022, Hal. 231-262

Penerapan reviu pengadaan barang/jasa secara online dilaksanakan dengan tujuan memudahkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan reviu pengadaan barang/jasa. PPK dalam melaksanakan tugas di daerah bisa melaksanakan reviu pengadaan barang/jasa tanpa menunggu waktu secara bersamaan dengan Pokja Pemilihan. Reviu secara online juga dapat mengurangi biaya dan penggunaan kertas sehingga tidak membutuhkan lemari arsip. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa secara individual maupun kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reviu spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) barang/jasa sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, untuk pekerjaan teknis, pokja pemilihan belum memiliki kesamaan persepsi dikarenakan pokja pemilihan tidak semuanya memiliki kualifikasi teknis. Begitupun dengan PPK yang sulit dalam menyusun spesifikasi teknis. Untuk reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penyusunan dan penetapan HPS telah disadari akan membawa risiko apabila dilakukan secara tidak cermat. Pada reviu rancangan kontrak, ditemukan bahwa PPK belum sepenuhnya mengisi secara lengkap isian pada syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) sehingga sulit menentukan jenis kontrak yang digunakan. Reviu analisis pasar terbukti dapat mengurangi resiko, karena semakin banyak informasi, data, dan pengetahuan pasar, maka penyusunan HPS akan lebih baik. Selanjutnya reviu ID paket RUP dan dokumen anggaran, PA/KPA/PPK telah mengumumkan data RUP ke dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SiRUP) dan ditayangkan melalui portal pengadaan nasional, sehingga ID paket RUP dan anggaran telah sesuai. Reviu waktu penggunaan barang berdampak pada proses pemilihan penyedia barang/jasa. Semakin

dekat waktu pemanfaatan/penggunaan barang/jasa, maka waktu proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa semakin kecil.

Kata Kunci: inovasi; pengadaan barang/jasa pemerintah.

Andi Ni'mah Sulfiani, Riska Firdaus

Pengawasan Pemerintah Dalam Praktek Illegal Logging Di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo

Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2 Desember 2022, Hal. 263-282

Pengawasan adalah salah satu kegiatan yang sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh mana kegiatan yang telah direncanakan bisa tercapai. Penelitian ini meneliti tentang pengawasan pemerintah dalam praktek *illegal logging* di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemerintah dalam praktek *illegal logging* di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Metode penelitian kualitatif dengan penjabaran data secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data di lakukan dengan obseravasi, wawancara serta dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah dalam praktek *illegal logging* di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo sudah terlaksana dengan baik berdasarkan informasi dari informan-informan yang ada. Sumber daya material yakni berupa alat dan bahan dalam pengawasan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo juga digunakan sebaik mungkin contohnya para pengawas memiliki kendaraan untuk patroli. Dalam menangani masalah penebangan hutan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo diharapkan pihak-pihak kehutanan itu sendiri, polisi kehutanan, serta para aparat pemerintah setempat dan juga masyarakat saling bekerjasama dan berkoordinasi dalam melindungi hutan yang ada sehingga praktek *illegal logging* di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo bisa teratasi dengan baik dibawah pengawasan pemerintah.

Kata kunci: pengawasan; pemerintah; *illegal logging*.

Henri Prianto Sinurat, Ervina Yunita, Rati Sumanti

Strategi Peningkatan Partisipasi Keluarga Berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2 Desember 2022, Hal. 283-300

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi peningkatan partisipasi keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penelitian ini telah memetakan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penerapan program KB. Tantangan yang dihadapi Petugas KB di Kabupaten Kepulauan Mentawai meliputi wilayah kerja berbentuk kepulauan, terbatasnya akses transportasi, terbatasnya jumlah sumber daya manusia, serta belum terbukanya masyarakat adat terhadap program KB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis SWOT, teknik pengumpulan data melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi, sehingga diperoleh informasi strategi peningkatan partisipasi keluarga berencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tujuannya agar ditemukan strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menerapkan program KB.

Strategi yang dilakukan adalah kaderisasi Program KB, penerapan inovasi Bona Keren Jelita, pelibatan tokoh masyarakat adat dalam program KB.

Kata Kunci: partisipasi; program keluarga berencana; daerah kepulauan; mentawai.

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

PUSLATBANG KMP LAN RI

P-ISSN: 1858-2168

E-ISSN: 2621-251X

Volume XVIII Nomor 2 December 2022

The abstract sheet may be reproduced/copied without permission or charge.

Sitti Rabiatal Wahdaniyah Herman, Yulian Sri Lestari, Sunardi
***Digital-Based Learning Acceleration in Improving Employee Competence in the
Pandemic Period***

Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2 December 2022, Page 155-171

Work From Home (WFH) is a new phenomenon that has hit government bureaucratic institutions in Indonesia. This work scheme seems to be a new work culture in line with the strengthening of the COVID-19 case that has hit Indonesia. Government bureaucracy in rural areas is one of those affected by the implementation of a new work culture, work from home. This condition is problematic, because at the same time dealing with the culture of serving rural communities who are used to meeting face to face. This study will photograph various problems from work from home practices implemented in two villages in Sigi Regency. Using a qualitative approach, data collection techniques were conducted through interviews. Interviews were conducted with the village secretary of Kalubula, Head of Ampanau Village Development, two staff members in each of the two villages, community leaders and a number of members of the community. The results showed that the form of work from home that was carried out by the two villages in different ways was responded to unfriendly by the village community. The village in Kalubula responded to developments in COVID-19 by implementing work by dividing work shifts, while in Ampanau village it was carried out by limiting service hours. Instead of streamlining public services in rural areas, it turns out that in the field this new work culture has created new problems.

Keywords: rural; public service; work culture; Covid-19

Yunni Susanty
***Competency Development Program Evaluation Based on Kirkpatrick Evaluation
Model Level 1 and Level 2***

Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2 December 2022, Page 172-191

The development of competencies for Civil Servants is needed in order to improve employee performance that will contribute positively to organizational performance. For this reason, competency development programs must be evaluated to see the effectiveness of their implementation. The purpose of this study is in order to evaluate competency development programs using kirkpatrick level 1 evaluation model to find out the level of satisfaction of participants and Kirkpatrick evaluation model level 2 to find out if there is

an increase in participants' knowledge after participating in the competency development program. The technique of processing and analyzing data in this study uses quantitative descriptive analysis methods. Based on the results of this study, it can be concluded that participants are satisfied with the facilitator aspect and the organizer aspect and there is an increase in participants' knowledge before and after learning. The results of this research are expected to be taken into consideration to improve the quality and effectiveness of the implementation of competency development programs in the future.

Keywords: *evaluation; Kirkpatrick's evaluation model; competency development*

Sandy, Sitti Khadijah Herdayani Darsim, Jumalia Mannayong
Implementation of Open Workspace in increasing employee productivity

Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2 December 2022, Page 192-210

This paper reviews leadership dissonance and its impact on employee job discomfort in public sector government organizations. The aim is to provide an overview and analysis related to leadership dissonance towards employee work discomfort in public sector government organizations, as well as the efforts that can be made to reduce the level of dissonance in the leadership. The writing method used is the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) method. The author uses this method because the research protocol of the PRISMA method is detailed and complete which allows avoiding subjective bias to conduct a literature review without conducting a direct field study. The results of a search of various literatures found that the emotions that people feel when they work will directly reflect the true quality of their work life. Dissonant leaders can be compared to individuals with "type A" and neurotic personalities. This type of leader makes the work atmosphere uncomfortable because the attitudes, behaviors and decisions of the leadership often spread negative emotions. Some actions that can be taken to reduce dissonance are; (1) changing attitudes or behavior through mindfulness, hope, and compassion, (2) implementing the core philosophy, and (3) applying the Johari's Window technique.

Keywords: *leadership; leadership dissonance; public sector performance*

Abdul Sabaruddin, Rahmat Hidayat, Ditha Putri Lestari
Analisis Digitalisasi Pelayanan Pembayaran Pensiun Melalui Aplikasi Taspen Otentikasi di PT Taspen (Persero) Kendari

Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2 December 2022, Page 211-230

This study aims to analyze and describe how the process of digitizing pension payment service through the Taspen Authentication at PT Taspen (Persero) Kendari. The method used in this study uses a qualitative descriptive technique. The location in this research is PT Taspen (Persero) Kendari. Informants in this study consisted of employees of PT Taspen (Persero) Kendari and beneficiaries of pension funds. The types and sources of data in this study are using primary data and secondary data. The data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. The result of research on the analysis of digitizing pension payment service through the Taspen Authentication application at PT Taspen (Persero) Kendari it has been going well because it has implemented three elements of digitalization development in the public sector. First, Support from PT Taspen (Persero) Kendari in the form of support from

branch head to staff and the allocation of human resources, financial, time, information and technology infrastructure. The second, capacity in terms of financial, technology infrastructure and competent human resources. The third, value given to retirees with the Taspen Authentication application in the form of familiarity and convenience in using the application and the retirees find it helpful to authenticate every month through the Taspen Authentication application because it is more efficient and affordable.

Keywords: digitization; service; pension; Taspen Authentication application

Rusman Tangilomban, Muttaqin, Deasy Mauliana

The Implementation Of Online Review For Good/Service Procurement In Government Of South Sulawesi Province

Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2 Desember 2022, Page 231-262

The implementation of an online review of goods/services procurement is carried out with the aim of facilitating the selection by the Working Group and Commitment Making Officer (PPK) in South Sulawesi Provincial Government in carrying out a review of goods/services procurement. PPK in carrying out its duties in the regions can carry out a review of the procurement of goods/services without waiting for time simultaneously with the Selection Working Group. Online review can also reduce costs and use of paper so there is no need for filing cabinets. This research uses descriptive qualitative approach with data collection techniques using interviews, observation, and document review related to research to describe and analyze phenomena, either individually or in groups. The results of the study indicate that the review of technical specifications/Terms of Reference (TOR) for goods/services has been running as it should. However, for technical work, the selection working groups do not yet have the same perception because not all of the selection working groups have technical qualifications. Likewise with PPK which is difficult in preparing technical specifications. For self-estimated price (HPS) reviews, it is realized that the preparation and determination of HPS will carry risks if it is done carelessly. During the review of the contract design, it was found that the PPK had not completely filled in the specific terms of the contract (SSKK) so that it was difficult to determine the type of contract to use. Market analysis review is proven to be able to reduce risk, because the more information, data and market knowledge, the better HPS preparation. Furthermore, reviewing the RUP package ID and budget documents, PA/KPA/PPK has announced the RUP data into the Goods/Services Procurement General Planning System (SiRUP) and broadcast through the national procurement portal, so that the RUP package ID and budget are in accordance. Reviewing the time of use of goods has an impact on the process of selecting goods/services providers. The closer the time of utilization/use of goods/services, the shorter the processing time for the implementation of goods/services procurement.

Keywords: discipline; accountability; public service.

Andi Ni'mah Sulfiani, Riska Firdaus

Government Supervision in Illegal Logging Practice in Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Palopo City

Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2 Desember 2022, Page 263-282

Supervision is one of the very important activities to do to see how far the planned activities can be achieved. In this study examining government supervision in the practice of illegal logging in the Battang Village, Wara Barat District, Palopo City. This study aims to determine how government supervision in the practice of illegal logging in the Battang Village, Wara Barat District, Palopo City. To achieve this goal, the authors use qualitative research methods with descriptive data elaboration. The data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation using qualitative descriptive analysis techniques. The results showed that government supervision in the practice of illegal logging in the Battang Village, Wara Barat District, Palopo City has been carried out well based on the information from the available informants. Material resources, namely in the form of tools and materials for supervision in the Battang Village, Wara Barat District, Palopo City are also used as well as possible, for example the supervisors have vehicles for patrols. In dealing with the problem of deforestation in Battang Village, Wara Barat Subdistrict, Palopo City, it is hoped that the forestry parties themselves, the forestry police, as well as local government officials and also the community work together and coordinate in protecting the existing forest so that the practice of illegal logging in Battang Village, Wara District West Palopo City can be handled properly under the supervision of the government.

Keywords: supervision; government; illegal logging.

Henri Prianto Sinurat, Ervina Yunita, Rati Sumanti

Strategies for Increasing Family Planning Participation in Mentawai Island

Jurnal Administrasi Publik Volume XVIII Nomor 2 Desember 2022, Page 283-300

This study aims to examine strategies for increasing family planning participation in the Mentawai Islands District. This research has mapped the challenges faced by the Mentawai Islands District Government in implementing the KB program. The challenges faced by family planning officers in the Mentawai Islands Regency include work areas in the form of islands, limited access to transportation, limited number of human resources, and the fact that indigenous peoples are not open to the family planning program. This study uses qualitative methods with SWOT analysis, data collection techniques through interviews, document review and observation, so that information on strategies to increase family planning participation in the Mentawai Islands District is obtained. The goal is to find strategies to overcome existing problems so as to increase community participation in implementing family planning programs. The strategy taken is the regeneration of the KB program, the application of Bona Keren Jelita innovations, and the involvement of traditional community leaders in the KB program.

Keywords: participation; family planning programs; island regions; Mentawai.